



Rencana Aksi Area 2 Deregulasi Kebijakan

Jakarta, 6 April 2022

1 Identifikasi dan Pemetaan Regulasi

2 Deregulasi Aturan yang Menghambat/Tidak Harmonis/Tidak Sinkron

3 Penguatan Sistem Regulasi Nasional

4 Perencanaan Kebijakan

5 Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan



1. Identifikasi dan Pemetaan Regulasi

Melakukan pemetaan keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar.

Pemetaan dilakukan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI terkait:

April

**Barang Milik
Negara**

Juni

**Jabatan
Fungsional**

Agustus

**Penguatan
Pengawasan**

November

Kepegawaian

2. Deregulasi Aturan yang menghambat/ tidak sinkron/ tidak harmonis

Pada tahun 2022, deregulasi dilaksanakan dengan cara:

Penyusunan
Naskah Evaluasi
Persekjen
Pembentukan
Produk Hukum



Januari 2022

Penetapan
Persekjen
tentang
Pembentukan
Produk Hukum




Februari 2022

Identifikasi, Analisis, dan
Harmonisasi Usulan
Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI untuk
Prioritas Tahunan



Oktober-
Desember 2022



3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional

Pada tahun 2022, penguatan regulasi dilakukan dengan mengembangkan aplikasi terkait pembentukan produk hukum:



**Melakukan Pengembangan
JDIH**

Input data produk hukum dalam aplikasi
JDIH.

Integrasi JDIH dengan Legalitas.

**Januari –
Desember 2022**



**Bimtek dan
Sosialisasi
Aplikasi
Legalitas**

Juni 2022



4. Perencanaan Kebijakan yang Meliputi Agenda Setting

Agenda Setting meliputi:

**Inventarisasi Usulan
Persekjen dari Unit
Pengusul**

**Oktober –
Desember 2022**

**Penetapan Program
Prioritas Tahun 2023**

Desember 2022



Terima kasih